

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KOLAKA KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Oleh : Margaretha Badu, Juneas Mahani Ampugo

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini, masing-masing; data primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan melalui hasil studi pustaka dan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas, adalah masih rendah ; 2). Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dalam berbagai hal dapat dikategorikan masih rendah ; 3). Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa yang sudah dilakukan selama ini, dapat dikategorikan masih rendah. Adapun faktor yang dinilai mempengaruhi sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara masih kurang adalah faktor motivasi dari masyarakat desa Kolaka itu sendiri

Kata Kunci : *Partisipasi dan Pembangunan.*

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud sering terdapat berbagai aturan dan anjuran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar diusahakan supaya masyarakat lebih partisipatif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan itu pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah berkewajiban membangun prasarana berdasarkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),

sedangkan masyarakat berkewajiban membangun yang lainnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam penataan ruang sebagai salah satu wujud pembangunan seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang juga telah ditentukan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam kegiatan penataan ruang, maupun pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 2 dan Pasal 6). Adapun bentuk peran

serta masyarakat dalam penataan ruang juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, untuk tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten, yang sebagian besar mengemukakan peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian informasi, masukan, pendapat, saran, pemikiran, serta pertimbangan bagi Pemerintah. Pada beberapa bagian juga dikemukakan peran serta masyarakat dalam bentuk kerjasama, bantuan tenaga, bantuan teknik, penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan ruang.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga sangat diperlukan. Dalam hal ini pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan prakarsa dan meningkatkan keterampilan melalui bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah sesuai dengan bidang dan besarnya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat desa diberi kesempatan secara langsung melalui swadaya gotong royong, untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah dalam membangun daerah pedesaan. Berkaitan dengan hal ini, Bambang dan Munawar Noor dalam (Innayatullah,1990; 6) mengemukakan bahwa: ‘ pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan, menguasai lingkungan sosial disertai meningkatkan taraf hidup mereka sebagai akibat penguasaan tersebut’.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam konteks pembangunan desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa, juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat secara bersama-sama dengan pemerintah desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta

pengawasan terhadap pembangunan desa karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. namun, berdasarkan pengamatan awal peneliti pada objek yang akan di teliti, bahwa pembangunan yang sudah dilakukan selama ini di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas ; mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, praktis hanya di dominasi oleh pemerintah desa saja. Sementara, masyarakat desa lebih terkesan pasif, tergantung pada pemerintah desa, dan bahkan acuh tak acuh untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa itu sendiri. Artinya, dalam hal ini motivasi atau tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pembangunan desa dimaksud, masih rendah. Akibatnya, apa yang menjadi tujuan utama dari pembangunan desa Kolaka itu sendiri (mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada) capaiannya belum seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian secara empiris pada objek yang akan di teliti dengan mengangkat judul ; “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara“

TEORI DAN KONSEP

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran

serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang (Canter, dalam Sirajuddin dkk; 13:2006). Secara sederhana Canter mendefinisikan sebagai feed-forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat kepemerintah atas kebijakan itu).

Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Keleompok yang selama ini tidak di ikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Bahasan yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas incentive material yang mereka butuhkan (Goulet dalam Sirajuddin dkk; 13:2006). Dengan kata lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai "paspor" mereka untuk mempengaruhi lingkup makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

Cormick membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta

masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Disamping persepsi yang dikemukakan Canter, Cormick, Goulet dan Wingert (Gibson dalam Sirajuddin; 14: 2006) merinci peran serta masyarakat sebagai berikut :

3. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan.

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).

4. Peran Serta Masyarakat Sebagai Strategi.

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

5. Peran Serta Masyarakat Sebagai Alat Komunikasi.

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah

masukannya yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

6. Peran Serta Masyarakat Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa.

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biases*).

7. Peran Serta Masyarakat Sebagai Terapi.

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Pengertian Pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan setiap Negara mempunyai perbedaan dalam hal penerapan strategi maupun kebijakan, karena adanya perbedaan kondisi geografis dan kondisi masyarakat bangsa yang bersangkutan. Meskipun demikian pembangunan yang dilaksanakan secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Menurut Siagian (2000 : 15) bahwa pembangunan adalah "Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan

gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Sumber data penelitian menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang berjumlah 8 orang dan data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh melalui literature dan data-data dari kantor Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendepanelitiankan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk menggambarkan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

1. Bersama Pemerintah Desa Melakukan Perencanaan

Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek yang diteliti, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas, adalah masih rendah. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut, antara lain bisa dilihat dari minimnya kehadiran masyarakat dalam

mengikuti pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa yang diadakan oleh pemerintah desa. Sehubungan dengan hal ini, alasan yang peneliti peroleh dari beberapa narasumber sehingga mereka tidak tergerak untuk mengikuti pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa yang diadakan oleh pemerintah desa tersebut, antara lain sebabkan oleh karena mereka sibuk dengan pekerjaan rutin mereka, yaitu bertani. Selain itu juga, ada yang dikarenakan oleh karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dimuka umum sehingga mereka enggan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa yang diadakan oleh pemerintah desa. Hal ini seperti yang tercermin dari ungkapan Kepala Desa Kolaka dalam suatu wawancara, mengatakan;

“Setiap kali kami sebagai pemerintah desa ingin menjalankan program-program pembangunan desa, kami sering mengundang masyarakat untuk ikut dalam pertemuan (musyawarah) desa guna membicarakan rencana-rencana yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa dimaksud. Tapi terkadang yang datang hanya itu-itu saja, yaitu orang-orang yang bisa bicara dan orang-orang yang tidak datang, itu biasanya dikarenakan mereka tidak bisa berbicara dimuka umum.

Demikian halnya seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Kolaka dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan;

Memang yang sering menjadi kendala masyarakat untuk bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa selama ini, dikarenakan waktu untuk pertemuan dengan waktu mereka untuk bekerja sering bersamaan waktunya. Sehingga, biasanya yang hadir hanya sedikit. Namun demikian, walaupun hanya sedikit yang hadir dalam pertemuan tersebut,

tetap kami dengarkan usul, saran, dan bahkan kritik dari mereka untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan ketika keputusan akan diambil.

Bertolak dari hasil wawancara tersebut di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita, bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa selama ini, dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan. Padahal dari pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa tersebut, diharapkan masyarakat desa secara menyeluruh dapat menghadirinya untuk mendengarkan masukan, ide atau gagasan mereka untuk kemudian diformulasikan dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga apa yang dihasilkan dari perencanaan pembangunan desa tersebut, dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat desa Kolaka secara menyeluruh.

2. Bersama Pemerintah Desa Melaksanakan Pembangunan (Fisik).

Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, adalah sesuatu hal yang dinilai penting di dalam rangka mendorong percepatan pembangunan itu sendiri. Keterlibatan langsung masyarakat seperti ini pada umumnya bersifat pada wujud yang terlihat jelas, seperti partisipasi dalam bentuk tenaga.

Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas. Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan di desa Kolaka, tentunya tidak bisa lepas dari keterlibatan langsung masyarakat yang di dorong oleh adanya kesadaran, solidaritas serta sifat gotong royong dari masyarakat desa Kolaka itu sendiri. Karena dengan adanya kesadaran, solidaritas, dan sifat gotong royong dari masyarakat, pelaksanaan pembangunan di desa Kolaka pasti akan

berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek yang diteliti, diperoleh gambaran bahwa ; pelaksanaan pembangunan yang di dorong oleh kesadaran, solidaritas serta sifat gotong royong masyarakat desa Kolaka, dalam berbagai hal dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini antara lain bisa dilihat dari kurangnya keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan-kegiatan membersihkan saluran air, memperbaiki jembatan yang rusak, perbaikan/ pembersihan jalan, membersihkan Kantor Desa, serta kegiatan lain yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat, seperti ; pembuatan kandang-kandang ternak milik masyarakat bersangkutan. Dalam kegiatan-kegiatan dimaksud, masyarakat desa terkesan kurang peduli dengan hal tersebut. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan membersihkan Kantor Desa, kehadiran mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sangat minim. Sementara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, di butuhkan tenaga yang memadai. Akibat dari kurang memadainya tenaga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, hasilnya menjadi tidak maksimal. Padahal kalau melihat kondisi kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu itu, sesungguhnya tidak memerlukan waktu lama untuk penyelesaiannya, hanya + 2 jam pelaksanaan kegiatan tersebut selesai, jika kegiatan tersebut dikerjakan dengan banyak orang secara gotong royong. Hal ini seperti yang tercermin dari ungkapan salah seorang narasumber “ K “ dalam suatu wawancara, mengatakan;

Kalau dilihat dari jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa, hampir boleh dikatakan, selalu kurang. Saya

tidak tahu juga, kenapa begitu. Padahal kegiatan-kegiatan pembangunan desa seperti yang Bapak maksud itu, adalah juga untuk masyarakat sendiri.

Dengan nada yang sama, juga seperti yang tercermin dari ungkapan narasumber lain “H“ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan ;

Setiap kali ada kegiatan-kegiatan pembangunan desa seperti; pembersihan saluran air, perbaikan jalan, atau perbaikan jembatan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan tersebut ada. Hanya saja memang sering tidak semua warga masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam hal pembersihan saluran air misalnya, yang mengerjakannya, biasanya hanya warga masyarakat yang ada disekitar saluran air itu.

Dari hasil wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa partisipasi masyarakat desa Kolaka dalam pelaksanaan pembangunan desa, dapat dikatakan masih rendah. Dalam hal ini, tingkat kesadaran, solidaritas, dan sifat gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh, tergolong pada kategori rendah.

3. Bersama Pemerintah Desa Melakukan Pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya adalah diperuntukkan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek yang diteliti, diperoleh gambaran bahwa; partisipasi masyarakat desa Kolaka dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa yang sudah dilakukan

selama ini, dapat dikategorikan masih rendah. Kurang lancarnya saluran air desa mengalir ke rumah masing-masing warga desa karena adanya penyumbatan, adanya irigasi yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat tani, serta adanya jembatan desa yang kondisinya sesungguhnya tidak layak lagi untuk digunakan, adalah gambaran yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang sudah ada selama ini di desa Kolaka, tidak terawasi dengan baik oleh masyarakat melalui tindakan merawat, memelihara dan menjaga hasil pembangunan tersebut. Padahal merawat dan memelihara hasil pembangunan adalah merupakan bagian dari tindak lanjut pengawasan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri. Namun akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat dan memelihara hasil pembangunan tersebut, mengakibatkan hasil pembangunan yang ada sekarang ini menjadi sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehubungan dengan hal ini, berikut akan ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber “ D “ dalam suatu wawancara, mengatakan;

Jujur saja Pak' kalau dilihat dari perawatan dan pemeliharaan terhadap pembangunan yang ada sekarang ini, sepertinya tidak ada dari masyarakat. Ada tidaknya perawatan dan pemeliharaan yang seperti Bapak maksud, itu sangat tergantung dari kesadaran masyarakat bersangkutan, kesadaran masyarakat untuk merawat dan memelihara ini yang belum ada pada diri masyarakat.

Demikian halnya seperti yang diungkapkan oleh narasumber lain “ J “ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan;

Kayaknya sudah bukan rahasia lagi kalau biaya perawatan atau pemeliharaan pembangunan seperti yang Bapak maksud itu, ada anggarannya. Jadi buat apa kita

buang-buang waktu untuk merawat atau memelihara bangunan yang sudah ada, sementara biaya untuk merawat atau memelihara, atau bahkan memperbaiki bangunan tersebut, anggarannya ada Artinya, sewa saja kepada siapa yang ingin melakukan perawatan atau pemeliharaan pembangunan tersebut.

Kutipan hasil wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali menyiratkan pada kita, bahwa kesadaran dan kepedulian dari masyarakat untuk merawat dan memelihara hasil dari pada pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa Kolaka selama ini, adalah masih rendah.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan terlebih dahulu di atas, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas, adalah masih rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, dari hasil observasi peneliti pada objek yang diteliti, diketahui bahwa motivasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas, adalah masih lemah. Lemahnya motivasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, antara lain bisa dilihat dari kurang pedulinya atau kurang terangsangnya masyarakat untuk berbuat yang terbaik bagi desanya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang sudah dilakukan selama ini. Dalam hal ini, masyarakat terkesan lebih peduli dengan kegiatan mereka sendiri (bertani) dibanding dengan kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama. Kenapa demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa sebagian besar

dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber tersebut mengatakan :

Bahwa sudah bukan rahasia lagi kalau melakukan pembangunan desa secara menyeluruh termasuk merawat dan memelihara pembangunan tersebut itu ada anggarannya. Jadi, bilamana masyarakat dibutuhkan untuk melakukan, merawat, dan memelihara pembangunan yang sudah ada sekarang ini, lantas mereka tahu bahwa tidak ada semacam penghargaan yang akan diberikan kepada mereka, hal inilah yang menyebabkan sehingga motivasi mereka kurang termotivasi untuk melakukan, merawat, dan memelihara pembangunan tersebut. Untuk jelasnya.

Berikut akan ditampilkan rangkuman hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber seperti yang terlihat pada bagian berikut dibawah ini.

Jujur saja, kenapa motivasi masyarakat di desa ini kurang alias lemah dalam melaksanakan, merawat, dan atau memelihara pembangunan yang sudah ada sekarang ini. Karena, selama ini mereka menganggap bahwa untuk melakukan semua itu, ada anggarannya. Jadi ada semacam harapan dari mereka, kalau melakukan semua itu, mereka akan diberi upah tetapi hal ini tidak seperti yang mereka harapkan. Hal inilah yang mungkin membuat motivasi mereka itu kurang.

Bertolak dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita, bahwa motivasi masyarakat dalam pembangunan desa Kolaka Kecamatan Mori Atas, adalah kurang alias lemah. Akibatnya, hasil dari pada pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini, menjadi kurang terawat dan terpelihara dengan baik sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan tersebut juga menjadi tidak optimal. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan

di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dapat dipengaruhi oleh motivasi masyarakat desa Kolaka itu sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis dan pembahasan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas adalah masih rendah, itu disebabkan karena masyarakat lebih sibuk dengan pekerjaan rutin mereka, yaitu bertani. Selain itu juga, ada yang dikarenakan oleh karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dimuka umum sehingga mereka enggan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa yang diadakan oleh pemerintah desa.
2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan masih rendah, itu antara lain disebabkan oleh karena tingkat kesadaran, solidaritas, dan sifat gotong royong masyarakat (dalam pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh) yang masih minim.
3. Bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa yang sudah dilakukan selama ini dikategorikan masih rendah, itu dikarenakan masyarakat menilai bahwa waktu yang digunakan untuk pergi kekebun dan kesawah mereka lebih penting dari pada melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, termasuk melakukan perawatan dan pemeliharaan pembangunan.
4. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kolaka Kecamatan Mori Atas secara umum adalah masih rendah, itu disebabkan oleh karena tidak adanya motivasi atau dorongan yang bisa

menggerakkan mereka untuk lebih peduli dengan pembangunan desa.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan :

1. Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, hendaknya pemerintah desa dapat lebih maksimal mendorong seluruh masyarakat desa agar mereka lebih peduli dengan pertemuan-pertemuan (musyawarah) desa.
2. Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, hendaknya pemerintah desa dapat lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran, solidaritas serta sifat gotong royong dari masyarakat.
3. Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan pembangunan desa, hendaknya pemerintah desa lebih mampu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, agar mereka lebih memahami akan pentingnya pembangunan desa.
4. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, hendaknya pemerintah desa dapat memberikan motivasi kepada masyarakat, agar mereka lebih terangsang atau terdorong untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyari, Sapari Imam, 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

- Bryant dan White, 1998, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan H.Abu Ahmadi, 2002, *Metologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Conyers, Diana, 1984, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Danim, Sudarman, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara. Cetakan Kedua, Jakarta.
- Eko Budihardjo, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung.
- Gomes, 1999, *Manajemen Suniber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Handoko, Hani, T dkk. 2002. *Strategi Organisasi*, Yogyakarta : Amara Books.
- Handoko, 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.
- Hardjito, Dydiet, 2001, *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2000, *Organisasi & Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kamaruddin, Mandalis 1998, *Partisipasi Masy dalam Pembangunan*, Unpad, Bandung.
- Korter , 1998, *Pembangunan Lembaga dalam Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*, UI Press, Jakarta.
- Koswara. 2000, *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial)*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2000. Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Makalah Seminar Otonomi Daerah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Batam.

- Moh. Tika P, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Moloeng, Lexy. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Rukmana DW, Nana, dalam Aisyah Ulfa. 2009. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1998, *Manajemen Strategiic Bumi Aksara*, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2004, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sirajuddin, dkk, 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara (Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Malang Corruption Watch (MCW), YAPPIKA, Jakarta.
- Soegijoko, Budhi Tjahjati don BS Kusbiantoro (ed), 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Grasindo, Jakarta.
- Soejono S. (ed), 2002, *Metode Penelitian Survai*. LP3ES, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif* Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administratif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjahyono, 2006. *Dinamika Pembangunan Pedesaan*, Yayasan Obor Gramedia, Jakarta.
- Todaro, MP, 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia.
- B. Dokumen - Dokumen

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang.